

PENGEMBANGAN MANAJEMEN LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL DI WILAYAH KEPULAUAN SERIBU WILAYAH DKJ

Nasrullah¹⁾, Achmad Fauzi²⁾, J. Anhar Rabi Hamsah Tis'ah³⁾, Suhendra⁴⁾, Abdul Basyit⁵⁾,
Muhammad Fathi Halimi⁶⁾, Agus Salim⁷⁾

^{1,2,5,6,7}Universitas Muhammadiyah Tangerang

³Universitas Muhammadiyah Jakarta

⁴Universitas Pakuan

¹nasrullah19861992@gmail.com, ²achmad.fauzi@umt.ac.id, ³anhar.rabi@umj.ac.id, ⁴suhendra@unpak.ac.id,

⁵abdulbasyit1971@gmail.com, ⁶Fathihalimi10@gmail.com, ⁷bani.samudra@gmail.com

Diterima 20 November 2025, Direvisi 20 Januari 2026, Disetujui 27 Januari 2026

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan tema *Pengembangan Manajemen Lembaga Pendidikan Nonformal (LPNF) di Wilayah Kepulauan Seribu, DKI Jakarta*. Latar belakang kegiatan ini adalah kondisi LPNF yang masih dikelola secara sederhana, tanpa perencanaan strategis, sistem evaluasi, maupun pemanfaatan teknologi yang memadai. Padahal, LPNF memiliki peran penting dalam menyediakan akses pendidikan alternatif bagi masyarakat kepulauan yang terbatas pada layanan pendidikan formal. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan model partisipatif-kolaboratif, melalui tahapan observasi, *Focus Group Discussion* (FGD), pelatihan, *workshop*, serta pendampingan intensif selama tiga bulan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebagian besar LPNF di Kepulauan Seribu menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya tata kelola kelembagaan, serta rendahnya pemanfaatan teknologi. Melalui intervensi berupa pelatihan manajerial, *workshop* penyusunan rencana kerja, serta pendampingan berkelanjutan, terjadi peningkatan signifikan dalam aspek perencanaan strategis, pengelolaan keuangan sederhana, pemanfaatan teknologi pembelajaran, dan partisipasi masyarakat. LPNF mulai menyusun dokumen rencana kerja, meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah daerah, serta menyesuaikan program dengan potensi lokal seperti kelautan, pariwisata, dan kewirausahaan. Kesimpulan dari kegiatan ini adalah bahwa penguatan manajemen LPNF berbasis partisipatif-kolaboratif mampu meningkatkan profesionalisme, efektivitas, dan keberlanjutan lembaga. Kegiatan ini tidak hanya memperbaiki kualitas layanan pendidikan nonformal, tetapi juga mendukung pemberdayaan masyarakat, mengurangi kesenjangan pendidikan antara pusat dan daerah, serta berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Kata Kunci: Pendidikan Nonformal; Manajemen Lembaga; Pengabdian Masyarakat; Kepulauan Seribu; Partisipatif-Kolaboratif.

ABSTRACT

This community service program aimed to strengthen the management of Nonformal Education Institutions (NFEIs) in the Thousand Islands Region, Special Capital Region of Jakarta (DKJ). The program addressed the common challenges faced by NFEIs, including limited strategic planning, weak evaluation systems, and minimal use of educational technology, despite their vital role in providing alternative education for island communities. A descriptive qualitative approach with a participatory collaborative model was employed through observation, Focus Group Discussions (FGD), training, workshops, and three months of intensive mentoring. The findings reveal that most NFEIs experienced constraints in human resources, institutional governance, and technology utilization. Managerial training and continuous mentoring resulted in notable improvements in strategic planning, basic financial management, technology-supported learning, and community involvement. Several institutions developed formal work plans, strengthened collaboration with local government, and aligned programs with local potentials such as marine-based activities, tourism, and entrepreneurship. Overall, participatory collaborative management effectively enhances institutional professionalism, effectiveness, and sustainability, while supporting community empowerment, reducing educational disparities, and contributing to the Sustainable Development Goals (SDGs).

Keywords: Nonformal Education; Institutional Management; Community Service; Thousand Islands; Participatory Collaborative.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Dalam konteks Indonesia, pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga formal seperti sekolah dan universitas, tetapi juga mencakup pendidikan nonformal yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah yang secara geografis terpencil dan minim akses terhadap pendidikan formal. Salah satu wilayah yang menghadapi tantangan besar dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal adalah Kepulauan Seribu, yang merupakan bagian administratif dari Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Kepulauan Seribu terdiri dari gugusan pulau-pulau kecil yang secara geografis terpisah dari daratan utama Jakarta. Kondisi geografis ini menimbulkan tantangan dalam aspek infrastruktur, transportasi, akses informasi, hingga pemerataan pendidikan. Lembaga pendidikan nonformal (LPNF), seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), serta rumah belajar komunitas, menjadi tumpuan masyarakat dalam memperoleh pendidikan dan keterampilan praktis. Namun, lemahnya manajemen kelembagaan dan sumber daya yang terbatas sering kali menjadi penghambat utama dalam pengembangan pendidikan nonformal yang berkualitas dan berkelanjutan di wilayah ini.

Manajemen lembaga pendidikan nonformal di Kepulauan Seribu belum menunjukkan pola yang efektif dan profesional. Banyak LPNF yang belum memiliki perencanaan strategis, sistem monitoring dan evaluasi program, serta manajemen keuangan dan sumber daya manusia yang baik. Hal ini berdampak langsung pada kualitas layanan pendidikan yang diberikan kepada masyarakat. Padahal, dalam konteks pembangunan daerah, keberadaan dan keberhasilan LPNF sangat penting untuk menjawab kebutuhan masyarakat lokal dalam hal literasi, numerasi, kewirausahaan, pelatihan kerja, dan pendidikan berbasis kearifan lokal.

Penguatan manajemen LPNF menjadi kebutuhan mendesak yang tidak bisa diabaikan. Dalam era digital dan globalisasi, lembaga pendidikan nonformal dituntut untuk berinovasi dan adaptif dalam memberikan layanan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pendampingan dan pengembangan kapasitas pengelola LPNF, baik dalam aspek perencanaan program, pengelolaan keuangan, pemanfaatan teknologi, hingga pelibatan masyarakat secara aktif dalam kegiatan pendidikan. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dirancang sebagai bentuk kontribusi akademisi untuk mendorong transformasi manajemen LPNF yang lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di Kepulauan Seribu.

Program ini didasarkan pada pendekatan partisipatif dan kolaboratif dengan menggandeng pihak-pihak terkait seperti Dinas Pendidikan DKJ, pemerintah kabupaten administrasi Kepulauan Seribu, tokoh masyarakat, dan pengelola LPNF di tingkat lokal. Harapannya, kegiatan ini tidak hanya bersifat intervensi sesaat, tetapi juga mampu membangun fondasi keberlanjutan dalam pengelolaan lembaga pendidikan nonformal di wilayah kepulauan tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan nonformal dapat didefinisikan sebagai jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang (Syaadah et al., 2022).

Pasal 31 ayat 1 UUD 1945 berbunyi setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Implementasi dari pasal tersebut tertuang dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 pasal 13 ayat 1 tentang sistem pendidikan nasional menyebutkan bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 Pasal 26 ayat 6, menyatakan sebagai berikut : Hasil pendidikan nonformal setara dengan pendidikan formal, setelah melalui proses penilaian oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) (Nurelisa et al., 2022).

Pendidikan nonformal awalnya merupakan sebuah pendidikan yang cakupan sosialnya lebih luas dibandingkan dengan pendidikan formal, namun dewasa ini sudah mulai menjadi konsen pemerintah dalam mensubstitusi secara kelembagaan. Pendidikan nonformal secara politis dikembangkan pada zaman penjajahan Belanda dan dilaksanakan di masyarakat dari awal perkembangan yang dari situlah terdapat kursus. Selain itu pendidikan nonformal sudah lama berkembang tetapi baru mendapat pengakuan dari yuridis di tahun 1989 yang berisi tentang system pendidikan nasional (Ahmad et al., 2022).

Philip H.Coombs berpendapat bahwa pendidikan *nonformal* adalah setiap kegiatan pendidikan yang terorganisir yang diselenggarakan di luar *system formal*, baik tersendiri maupun merupakan bagian dari suatu kegiatan yang luas, yang dimaksudkan untuk memberikan layanan kepada sasaran didik tertentu dalam mencapai tujuan-tujuan belajar (Dacholfany, 2018).

Soelaman Joesoef dalam (Haqqi, 2022) berpendapat bahwa pendidikan *non formal* adalah setiap kesempatan dimana terdapat komunikasi yang terarah di luar sekolah dan seseorang memperoleh informasi, pengetahuan, latihan maupun bimbingan sesuai dengan tingkat usia dan kebutuhan hidup, dengan tujuan mengembangkan tingkat keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang memungkinkan baginya menjadi pesertapeserta yang efisien dan efektif.

Pendidikan *nonformal* sebagai sumber pembelajaran kepada masyarakat harus dapat dilihat sebagai daya dukung terhadap realisasi dan pengelolaan program, dan dijadikan sebagai pengembangan program di masa yang akan datang. Sedangkan peran masyarakat sebagai sasaran, dapat dilihat pada tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti berbagai program yang berhubungan dengan peningkatan keterampilan, kemampuan, dan kualitas dirinya sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat miskin di daerah tersebut (Miradj & Sumarno, 2014).

Pendidikan nonformal dapat dibedakan sebagai prantara (*institution*) dan sebagai kegiatan (*setting*). Sebagai prantara,

pendidikan nonformal merupakan fenomena yang tumbuh di masyarakat bersama prantara lainnya seperti ekonomi, hukum, dan budaya. Secara kelembagaan pendidikan *nonformal* menjadi wahana atau mekanisme yang mempunyai struktur kelembagaan, peraturan, tugas, dan tata kerja. Di Indonesia struktur kelembagaan pendidikan ini di miliki oleh instansiinstansi pemerintah dan berbagai lembaga swasta yang bergerak di bidang pelayanan pendidikan. Di lingkungan instansi pemerintah, yang di beri tanggung jawab untuk membina pendidikan ialah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Instansi-instansi lain, baik lembaga departemen maupun lembaga nondepartemen. Memiliki badan atau pusat yang bergerak di bidang pendidikan dan latihan. Kelembagaan ini di dukung oleh keputusan Presiden Nomor 45 thun 1974 dn Nomor 15 tahun 1984 tentang susunan organisasi Departemen. Berbagai instansi pemerintah menyelenggarakan program pendidikan formal dan/ atau pendidikan nonformal (IX, n.d.2025).

Layanan pendidikan yang berperan sebagai pengganti, pelengkap, dan pelengkap pendidikan formal adalah pendidikan nonformal. PNF memiliki berbagai program yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Keterampilan dan pengetahuan sosial tidak dapat dikembangkan dengan hanya mengandalkan pendidikan formal. Oleh karena itu, masyarakat menganggap PNF penting untuk menunjang dan mewujudkan kehidupan yang lebih baik, karena PNF merupakan layanan pendidikan yang tidak dibatasi oleh waktu, jenis kelamin, kondisi sosial, usia, ras, agama, ekonomi, budaya, dan lain-lain (Saurina et al., 2023).

Kebutuhan masyarakat akan pendidikan nonformal (PNF) sekarang ini semakin bertambah meningkat. Banyak faktor yang mendorong terjadinya peningkatan kebutuhan PNF dalam kehidupan masyarakat. Perubahan masyarakat yang terjadi sangat cepat sekarang ini menyebabkan hasil pendidikan yang diperoleh di sekolah (pendidikan formal) menjadi tidak sesuai atau tertinggal dari tuntutan baru dalam dunia kerja. Ilmu pengetahuan, dan keterampilan yang diperoleh dari sekolah seolah-olah semakin cepat menjadi

usang dan kurang dapat digunakan untuk memecahkan tantangan baru yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi semacam ini menuntut adanya layanan pendidikan yang dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah yang berfungsi sebagai penambah atau pelengkap pendidikan formal. Pendidikan formal sering kurang dapat merespon bermacam-macam kebutuhan baru yang berkembang di masyarakat sebagaimana dijelaskan di atas, sehingga tuntutan layanan pendidikan nonformal sangat dibutuhkan (Kuntoro, 2006).

Tugas pendidikan non formal adalah membantu kualitas dan martabat individu dan warga negara dengan kemampuan dan kepercayaan pada diri sendiri untuk mengendalikan perubahan dan kemajuan (Budiyono, 2008). Berbagai macam tugas pendidikan non formal yang lain adalah sebagai berikut: a. Menjawab kemajuan teknologi yang membuat usangnya hasil penemuan masa lampau, sekaligus membuka perspektif-perspektif baru; b. Menanggulangi adanya berbagai persoalan-persoalan baru, harus belajar tentang bagaimana menghadapinya, soal-soal mana tidak dapat diserahkan kepada lembaga pendidikan informal maupun lembaga pendidikan formal; c. Mengikuti perkembangan alat komunikasi, yang memperluas kemungkinan untuk mengikuti pendidikan tanpa datang ke sekolah atau yang memperluas kemungkinan untuk mengajukan program pendidikan secara sistematis tanpa mengumpulkan orang dalam satu tempat yang sama; d. Telah terbentuk bermacam organisasi sosial yang menambah medan pendidikan serta kebutuhan akan menyelenggarakan pendidikan non formal sangat dibutuhkan masyarakat

Namun, kebanyakan program pendidikan *nonformal* ini diarahkan pada pelayanan kebutuhan pelajaran yang penting dan yang memberikan pada yang memberi keuntungan pada warga belajarnya yang pada umumnya tidak disajikan pada pendidikan formal. Kebutuhan-kebutuhan belajar itu misalnya yang berhubungan dengan kesehatan, nutrisi, keluarga berencana, dan persyaratan-persyaratan lainnya yang diperlukan untuk meningkatkan mutu kehidupan keluarga, mengembangkan perilaku

pribadi yang baik dan sikap yang positif, meningkatkan produktivitas prekonomian, penghasilan keluarga dan kesempatan kerja, serta memperkuat lembaga-lembaga swasembada dan swakarsa atau memperluas partisipasi pada lembaga tersebut. Sebagian besar program itu ditunjukkan untuk membantu kelompok-kelompok tertentu, misalnya para petani kecil, para tukang becak, dan para pengusaha, pemuda-pemuda putus sekolah yang menganggur, kelompok tani dan semacamnya (Hidayat et al., 2017).

Wilayah Kepulauan Seribu dipilih sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini karena memiliki sejumlah karakteristik dan tantangan unik yang menjadikannya sangat relevan dan membutuhkan intervensi dalam bidang pengembangan manajemen lembaga pendidikan nonformal. Beberapa alasan utama dilaksanakannya kegiatan ini di Kepulauan Seribu adalah sebagai berikut:

1. Akses Terbatas terhadap Pendidikan Formal
Sebagai wilayah kepulauan yang terpisah dari daratan utama Jakarta, Kepulauan Seribu menghadapi kendala serius dalam hal akses pendidikan formal, terutama bagi warga di pulau-pulau kecil yang jauh dari pusat layanan pendidikan. Lembaga pendidikan nonformal (LPNF) menjadi alternatif penting dalam menyediakan layanan pendidikan yang fleksibel, murah, dan berbasis kebutuhan masyarakat lokal.
2. Minimnya Kapasitas Manajerial Lembaga Pendidikan *Nonformal*
Hasil observasi awal menunjukkan bahwa sebagian besar LPNF di Kepulauan Seribu masih dikelola secara sederhana dan belum memiliki sistem manajemen yang terstruktur. Kurangnya pelatihan, pendampingan, dan akses terhadap informasi membuat banyak lembaga mengalami stagnasi dalam pengembangan program, pendanaan, dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan intervensi dalam bentuk pendampingan manajerial yang intensif dan berkelanjutan.
3. Kesenjangan Kualitas Pendidikan antara Pusat dan Wilayah

Sebagai bagian dari Provinsi DKI Jakarta, Kepulauan Seribu berada dalam bayang-bayang kesenjangan pembangunan. Meskipun secara administratif berada di ibu kota negara, realitas di lapangan menunjukkan adanya ketimpangan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia dibandingkan wilayah daratan. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu mengurangi ketimpangan tersebut melalui penguatan manajemen lembaga pendidikan nonformal sebagai pusat pemberdayaan masyarakat.

4. Potensi LPNF sebagai Motor Pembangunan Lokal

LPNF di wilayah ini memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pengembangan keterampilan dan ekonomi masyarakat, khususnya di bidang kelautan, pariwisata, kerajinan tangan, dan pelestarian lingkungan. Namun, potensi ini tidak akan optimal tanpa manajemen yang kuat. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan menjadi langkah strategis untuk memberdayakan masyarakat secara holistik.

5. Komitmen Pemerintah Daerah yang Mendukung

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu menunjukkan komitmen dalam mendukung pengembangan pendidikan nonformal sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah. Hal ini menjadi peluang besar untuk bersinergi dalam program pengabdian masyarakat, dengan dukungan kebijakan lokal yang berpihak pada penguatan LPNF.

6. Masih Rendahnya Literasi dan Keterampilan Masyarakat

Beberapa pulau di Kepulauan Seribu masih menghadapi permasalahan rendahnya tingkat literasi, numerasi, dan keterampilan produktif masyarakat. Pendidikan nonformal merupakan jalur yang tepat untuk meningkatkan keterampilan fungsional, kewirausahaan, dan pemberdayaan ekonomi, jika dikelola dengan pendekatan manajerial yang profesional dan berbasis kebutuhan.

7. Letak Strategis untuk Model Replikasi Wilayah Kepulauan Lain

Kepulauan Seribu dapat dijadikan sebagai lokasi percontohan pengembangan manajemen LPNF di wilayah kepulauan lainnya di Indonesia. Keberhasilan program ini diharapkan dapat direplikasi di daerah serupa yang menghadapi tantangan geografis dan aksesibilitas pendidikan.

Berdasarkan penjelasan pada pendahuluan di atas maka dengan adanya kolaborasi pengabdian kepada masyarakat antara Universitas Muhammadiyah Tangerang, Universitas Pakuan Bogor dan Universitas Muhammadiyah Jakarta di Kelurahan pulau Untung Jawa Kecamatan Kep Seribu selatan Kab Adm ke pulau seribu dengan tema "*Pengembangan Manajemen Lembaga Pendidikan Non Formal Di Wilayah Kepulauan Seribu Wilayah Dkj*" ini dapat memberikan solusi dan transformasi ilmu pengetahuan dari Perguruan Tinggi kepada Masyarakat untuk menjalani kehidupan yang lebih baik dan bermanfaat.

Rumusan masalah dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berangkat dari kondisi faktual manajemen lembaga pendidikan *nonformal* (LPNF) di wilayah Kepulauan Seribu yang masih lemah dan belum terkelola secara efektif. Permasalahan utama yang dihadapi antara lain belum adanya sistem manajemen yang terstruktur, keterbatasan sumber daya manusia, serta minimnya perencanaan strategis dan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan program. Hal ini berdampak pada rendahnya kualitas layanan pendidikan yang diberikan kepada masyarakat, padahal LPNF berperan penting dalam menyediakan akses pendidikan alternatif di wilayah kepulauan yang terbatas terhadap pendidikan formal. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam kegiatan ini meliputi: bagaimana kondisi manajemen LPNF di Kepulauan Seribu saat ini, apa saja kendala utama yang dihadapi dalam penyelenggaraan program, serta strategi pengembangan manajemen seperti apa yang tepat dan relevan untuk meningkatkan efektivitas serta

keberlanjutan lembaga tersebut dalam menjawab kebutuhan masyarakat lokal.

METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan model partisipatif-kolaboratif. (Moleong, 2017) yang menegaskan bahwa penelitian kualitatif deskriptif berusaha memahami makna, realitas sosial, dan interaksi yang terjadi secara natural. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan untuk memahami kondisi aktual manajemen lembaga pendidikan nonformal (LPNF), mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta merumuskan strategi pengembangan yang relevan bersama-sama dengan masyarakat dan pengelola lembaga.

Tahapan penelitian diawali dengan observasi dan asesmen awal di beberapa LPNF di wilayah Kepulauan Seribu. Observasi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran nyata terkait kondisi manajemen, meliputi aspek perencanaan program, pengelolaan sumber daya manusia, manajemen keuangan, serta pemanfaatan teknologi pembelajaran. Data pendukung juga dikumpulkan melalui dokumentasi, wawancara singkat, dan telaah dokumen kelembagaan.

Tahap berikutnya adalah pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) yang melibatkan pengelola LPNF, tutor, masyarakat setempat, serta perwakilan pemerintah daerah. Melalui FGD, diperoleh informasi mendalam mengenai kendala utama yang dihadapi lembaga, kebutuhan lokal yang belum terakomodasi, serta aspirasi masyarakat terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan nonformal.

Menurut Krueger & Casey dalam (Lestari & Sulisworo, 2024) menjelaskan bahwa FGD adalah suatu metode pengumpulan data kualitatif yang melibatkan diskusi kelompok kecil secara terarah dengan tujuan menggali pandangan, pengalaman, dan pemahaman partisipan terkait suatu isu tertentu. Kekuatan utama FGD adalah kemampuannya untuk mengungkap dinamika interaksi sosial yang tidak selalu muncul dalam wawancara individual.

Morgan dalam (Handayani & Iryanti, n.d.2025) menyatakan bahwa FGD merupakan teknik penelitian yang efektif untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai persepsi, sikap, dan ide dari sekelompok orang terhadap suatu fenomena. Diskusi kelompok memungkinkan peneliti menangkap perbedaan pendapat dan menemukan konsensus yang muncul secara alami dalam interaksi. Stewart & Shamdasani dalam (Ratminingsih et al., 2024) menegaskan bahwa FGD sangat bermanfaat dalam penelitian sosial dan pendidikan karena mampu menghasilkan informasi kontekstual yang kaya. Selain itu, FGD juga dapat berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam merumuskan solusi, sehingga tidak hanya bersifat eksploratif tetapi juga memberdayakan.

Patton dalam (Zahroh et al., 2025) menambahkan bahwa FGD adalah pendekatan yang fleksibel dan dapat digunakan dalam berbagai konteks, termasuk penelitian pendidikan, pengembangan program, maupun evaluasi kebijakan. Keunggulannya terletak pada kemampuannya mengumpulkan data kualitatif dalam waktu relatif singkat dengan memperhatikan keragaman perspektif.

Selanjutnya, dilakukan pelatihan dan workshop untuk meningkatkan kapasitas manajerial pengelola LPNF. Materi pelatihan mencakup penyusunan rencana kerja tahunan, perencanaan strategis, pengelolaan keuangan sederhana, pemanfaatan teknologi digital, serta evaluasi program pendidikan. Proses pelatihan didukung dengan studi kasus dan simulasi agar peserta mampu mempraktikkan secara langsung pengetahuan yang diperoleh.

Setelah pelatihan, dilaksanakan pendampingan intensif selama tiga bulan. Pendampingan ini mencakup monitoring, konsultasi, serta asistensi teknis terhadap pengelola LPNF dalam menerapkan hasil pelatihan ke dalam praktik manajerial sehari-hari. Evaluasi berkala dilakukan untuk mengukur perubahan yang terjadi, baik dari aspek administrasi, partisipasi masyarakat, maupun kualitas layanan pendidikan.

Metode ini mengintegrasikan penelitian dan pengabdian dengan prinsip *community development*, sehingga hasil yang dicapai tidak hanya berupa peningkatan pengetahuan, tetapi juga transformasi nyata

dalam pengelolaan lembaga. Dengan pendekatan kolaboratif, diharapkan keberhasilan pengembangan manajemen LPNF di Kepulauan Seribu dapat menjadi model yang berkelanjutan dan dapat direplikasi di wilayah kepulauan lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di wilayah Kepulauan Seribu menghasilkan beberapa temuan penting terkait kondisi manajemen lembaga pendidikan nonformal (LPNF), kendala utama yang dihadapi, serta strategi pengembangan yang dapat dilakukan. Pertama, hasil observasi dan asesmen menunjukkan bahwa sebagian besar LPNF masih dikelola secara sederhana, dengan pola manajemen yang belum terstandar. Dokumen perencanaan, sistem monitoring, serta mekanisme evaluasi program pendidikan belum tersusun dengan baik. Kondisi ini berdampak pada rendahnya efektivitas program yang dijalankan dan terbatasnya jangkauan layanan pendidikan bagi masyarakat.

Kedua, melalui *Focus Group Discussion* (FGD) teridentifikasi sejumlah kendala utama yang dihadapi, antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang manajemen pendidikan, minimnya pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan pembelajaran, serta rendahnya kemampuan pengelolaan keuangan lembaga. Selain itu, faktor geografis kepulauan yang menyulitkan akses transportasi juga memperkuat kesenjangan kualitas pendidikan dibandingkan dengan wilayah daratan Jakarta.

Ketiga, kegiatan pelatihan dan *workshop* yang diberikan berhasil meningkatkan pemahaman pengelola LPNF tentang perencanaan strategis, pengelolaan sumber daya, penyusunan Rencana Kerja Tahunan, serta pemanfaatan teknologi sederhana untuk mendukung proses pembelajaran. Pendampingan intensif selama tiga bulan memperlihatkan adanya perubahan positif pada sebagian besar lembaga, ditandai dengan tersusunnya dokumen rencana kerja, meningkatnya partisipasi masyarakat, dan terbentuknya jejaring kolaborasi antar LPNF maupun dengan pemerintah daerah.

Keempat, hasil kegiatan ini juga menunjukkan bahwa strategi pengembangan manajemen LPNF berbasis partisipasi masyarakat dan kearifan lokal sangat relevan untuk diterapkan. Model manajemen partisipatif mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program, sehingga kegiatan pendidikan lebih sesuai dengan kebutuhan lokal, khususnya di bidang keterampilan praktis, kewirausahaan, serta pemberdayaan ekonomi berbasis potensi maritim dan pariwisata.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian masyarakat ini berhasil memberikan dampak nyata berupa peningkatan kapasitas manajerial pengelola LPNF, terbentuknya rencana kerja strategis lembaga, serta lahirnya model pengembangan manajemen berbasis lokal yang potensial untuk direplikasi di wilayah kepulauan lainnya. Dengan demikian, LPNF di Kepulauan Seribu semakin siap bertransformasi menjadi pusat pendidikan alternatif yang adaptif, profesional, dan berkelanjutan.

Hasil kegiatan pengabdian masyarakat yang menunjukkan lemahnya manajemen lembaga pendidikan nonformal (LPNF) di Kepulauan Seribu sejalan dengan pendapat (Mahardhani, 2018) yang menegaskan bahwa pengelolaan pendidikan masyarakat harus berlandaskan *good governance* yang mencakup transparansi, akuntabilitas, serta responsivitas terhadap kebutuhan lokal. Ketidakterdediaan sistem perencanaan strategis, monitoring, dan evaluasi di sebagian besar LPNF membuktikan bahwa tata kelola lembaga belum berjalan sesuai prinsip tersebut.

Temuan adanya keterbatasan sumber daya manusia yang berkompeten dalam manajemen juga didukung oleh pandangan (Sutanto & Purwoko, 2019) yang menyatakan bahwa manajemen pendidikan nonformal harus berbasis pada fleksibilitas, kebutuhan lokal, dan partisipasi masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program yang mulai terbangun melalui FGD dan pendampingan menunjukkan relevansi pendekatan partisipatif-kolaboratif yang diyakini dapat memperkuat kapasitas kelembagaan.



Gambar 1. Foto bersama peserta setelah kegiatan

Selanjutnya, upaya pelatihan dan workshop yang mendorong pemanfaatan teknologi sederhana dalam pembelajaran sesuai dengan pandangan Chambers dalam (Rahmani & Humaedi, 2024) bahwa pemberdayaan masyarakat melalui model partisipatif dapat menghasilkan inovasi yang kontekstual serta berkelanjutan. Dengan demikian, hasil kegiatan ini menguatkan teori bahwa kolaborasi antara akademisi, pemerintah, dan masyarakat merupakan kunci keberhasilan dalam mengembangkan manajemen LPNF, khususnya di wilayah kepulauan yang menghadapi keterbatasan akses pendidikan formal.

Secara keseluruhan, temuan lapangan yang menunjukkan adanya peningkatan kapasitas manajerial, tersusunnya rencana kerja strategis, serta meningkatnya partisipasi masyarakat sesuai dengan pandangan Kemmis & McTaggart dalam (Habibi et al., 2024) yang menekankan bahwa penelitian dan pengabdian partisipatif tidak hanya menghasilkan pengetahuan baru, tetapi juga membawa perubahan nyata pada komunitas yang terlibat

Tabel 1. Ringkasan Hasil Pengabdian Masyarakat

Aspek	Kondisi Awal	Kendala	Intervensi (Kegiatan)	Hasil	Dampak
Manajemen LPNF	Dikelola secara sederhana, belum ada perencanaan strategis dan sistem evaluasi	Lemahnya tata kelola, belum ada dokumen perencanaan formal	Pelatihan & workshop perencanaan strategis, pendampingan penyusunan rencana kerja	Tersusunnya rencana kerja tahunan & dokumen manajemen	LPNF lebih terarah, mampu merancang program sesuai kebutuhan lokal
SDM Pengelola	Mayoritas belum memiliki keterampilan manajerial yang memadai	Kurangnya kompetensi dalam perencanaan, keuangan, dan evaluasi	Pelatihan manajemen lembaga, pengelolaan keuangan sederhana, simulasi evaluasi program	Peningkatan pemahaman manajerial pengelola	Pengelola lebih profesional, lembaga lebih adaptif dan berkelanjutan
Pemanfaatan Teknologi	Minim, sebagian besar belum menggunakan teknologi dalam pembelajaran atau administrasi	Keterbatasan akses & pengetahuan penggunaan teknologi	Workshop pemanfaatan teknologi sederhana (aplikasi administrasi, media pembelajaran digital)	Pengelola mulai menggunakan teknologi sederhana dalam kegiatan administrasi dan pembelajaran	Efisiensi meningkat, pembelajaran lebih menarik, akses informasi lebih luas
Partisipasi Masyarakat	Rendah, masyarakat hanya sebagai penerima layanan pendidikan	Kurangnya keterlibatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program	Focus Group Discussion (FGD), pendekatan partisipatif dalam perencanaan program	Masyarakat terlibat dalam penyusunan program dan mendukung kegiatan lembaga	Lahir rasa memiliki (sense of belonging), program lebih sesuai kebutuhan lokal
Jejaring & Kolaborasi	LPNF berjalan sendiri-sendiri, kurang sinergi antar lembaga maupun dengan pemerintah	Minim koordinasi dan dukungan antar pemangku kepentingan	Fasilitasi pertemuan dengan pemerintah daerah, pembentukan forum komunikasi antar-LPNF	Terbentuk jejaring kerja sama antar LPNF dan pemda	Kolaborasi meningkat, memperkuat keberlanjutan program
Mutu Layanan Pendidikan	Layanan masih terbatas, belum menjawab kebutuhan literasi, kewirausahaan, dan keterampilan lokal	Kesenjangan kualitas pendidikan dibandingkan wilayah daratan	Pendampingan intensif & integrasi potensi lokal (maritim, pariwisata, kerajinan tangan)	Layanan pendidikan lebih variatif, relevan dengan potensi dan kebutuhan masyarakat	Peningkatan keterampilan masyarakat, mendukung ekonomi lokal, mengurangi kesenjangan pendidikan pusat-daerah

SIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menyimpulkan bahwa kondisi manajemen lembaga pendidikan nonformal (LPNF) di wilayah Kepulauan Seribu masih menghadapi berbagai keterbatasan, baik dari segi perencanaan strategis, pengelolaan sumber daya manusia, manajemen keuangan, maupun pemanfaatan teknologi. Kendala utama yang ditemukan meliputi minimnya kapasitas manajerial pengelola, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan program, serta keterbatasan akses akibat faktor geografis kepulauan.

Melalui intervensi berupa observasi, FGD, pelatihan, *workshop*, dan pendampingan intensif, terjadi peningkatan signifikan pada kapasitas manajerial pengelola LPNF. Hal ini ditandai dengan tersusunnya rencana kerja strategis, meningkatnya kesadaran akan pentingnya tata kelola yang profesional, serta bertambahnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung kegiatan pendidikan nonformal. Strategi pengembangan manajemen berbasis partisipatif dan kolaboratif terbukti mampu menjawab kebutuhan lokal serta mendorong keberlanjutan program pendidikan di wilayah kepulauan.

Dengan demikian, penguatan manajemen LPNF di Kepulauan Seribu tidak hanya berkontribusi pada peningkatan mutu layanan pendidikan, tetapi juga berperan dalam pemberdayaan masyarakat, pengurangan kesenjangan kualitas pendidikan antara pusat dan daerah, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam bidang pendidikan berkualitas, pertumbuhan ekonomi lokal, dan pengurangan ketimpangan sosial.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, khususnya kepada pengelola Lembaga Pendidikan Nonformal (LPNF) dan masyarakat di wilayah Kepulauan Seribu atas partisipasi dan kerja sama yang baik selama kegiatan berlangsung. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pemerintah daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan Dinas Pendidikan DKJ atas dukungan dan fasilitasi yang diberikan. Selain itu, penulis mengapresiasi dukungan institusional dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Universitas Pakuan, dan Universitas Muhammadiyah Jakarta yang telah memungkinkan terlaksananya kegiatan ini dengan baik. Semoga hasil kegiatan ini memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi pengembangan pendidikan nonformal dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kepulauan.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad, A., Sari, A. J. T., Wardana, A. H., Rosyid, M. N. I., Widiyanto, E., & Rasyad, A. (2022). Tren Perkembangan Pendidikan Non-Formal. *JP (Jurnal Pendidikan): Teori Dan Praktik*, 7(2), 76–82.
- Budiyono, B. (2008). *Sistem Pendidikan Non Formal Pada Kawasan Kumuh Di Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat* [Phd Thesis, Universitas Diponegoro].
- Dacholfany, M. I. (2018). Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Non-Formal: Studi Kasus di PKBM Al-Suraya Kota Metro-Lampung. *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah*, 2(1), 43–74.
- Habibi, W., Ulum, A. K., Agustina, A., Hariroh, L., Uyun, S. F., & Nada, S. Z. (2024). Pengembangan Kesenian Al-Banjari Sebagai Pelestarian Budaya Islam. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Desa (JPMD)*, 5(2), 219–229.
- Handayani, W., & Iryanti, E. (N.D.). *Penerapan Teknik Focus Group Discussion (Fgd) Dalam Kajian Perilaku Impulse Buying*. Retrieved August 27, 2025, from
- Haqqi, F. (2022). *Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Non Formal dalam Pembinaan Karakter Santri di Dayah Modern Arun Lhokseumawe* [PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry].
- Hidayat, M. A., Anwar, A., & Hidayah, N. (2017). Pendidikan non formal dalam meningkatkan keterampilan anak jalanan. *EDUDEENA: Journal of Islamic Religious Education*, 1(1), 31–42.
- IX, B. (n.d.). A. Pengertian Pengaturan Pelaksanaan Sumber Belajar Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal. *MODUL*, 112. Retrieved August 27, 2025, from
- Kuntoro, S. A. (2006). Pendidikan nonformal (PNF) bagi pengembangan Sosial. *Jurnal Ilmiah Visi PTK-PNF*, 1(2).
- Lestari, P., & Sulisworo, D. (2024). Focus Group Discussion: Eksplorasi Pemanfaatan Virtual Reality bagi Guru Madrasah Tsanawiyah di Bantul. *Jurnal Pendidikan Madrasah*, 9(2), 275–284.
- Mahardhani, A. J. (2018). Pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan nonformal berkarakter cinta tanah air. *JPK (Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, 3(2), 56–63.
- Miradj, S., & Sumarno, S. (2014). Pemberdayaan masyarakat miskin, melalui proses pendidikan nonformal, upaya meningkatkan kesejahteraan sosial di

- Kabupaten Halmahera Barat. *JPPM (Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 1(1), 101–112.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif/Lexy J. Moleong*.
- Nurelisa, N., Kustiawan, K., & Nazaki, N. (2022). Analisis Pembinaan Lembaga Pendidikan Non Formal Pulau Tahfiz di Kelurahan Penyengat Kota Tanjungpinang 2018. *Student Online Journal (SOJ) UMRAH-Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(1), 140–151.
- Rahmani, S. A., & Humaedi, S. (2024). Partisipasi Masyarakat Dalam Program Pemberdayaan Amanah Fund Di Kampung Dadap Desa Jatimulya, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang Selatan, BANTEN. *Share: Social Work Journal*, 14(2), 116–125.
- Ratminingsih, N. M., Budasi, I. G., Santosa, M. H., Sudana, P. A. P., Wahyuni, L. G. E., Widyaastrena, P. A. W., & Parameswari, I. G. A. P. G. (2024). Optimalisasi Model Pembelajaran Pjbl: Persepsi Guru Terhadap Pelaksanaan Fgd Dan Pendampingan. *Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat*, 9(1), 125–134.
- Saurina, N., Retnawati, L., Pratama, F. H. S., & Pudjianto, U. (2023). Pengelompokan Seleksi Siswa Baru di Lembaga Pendidikan Non Formal Kabupaten Gresik Menggunakan Clustering K-Medoids. *Jurnal Sains Dan Informatika*, 36–45.
- Sutanto, J. E., & Purwoko, G. H. (2019). Taman Bacaan Untuk Meningkatkan Spirit Kewirausahaan Dan Mengakses Informasi Bisnis Bagi Masyarakat Kelurahan Made Kota Surabaya. *Jurnal Leverage, Engagement, Empowerment of Community (LeECOM)*, 1(1), 1–8.
- Syaadah, R., Ary, M. H. A. A., Silitonga, N., & Rangkuty, S. F. (2022). Pendidikan formal, Pendidikan non formal Dan Pendidikan informal. *PEMA*, 2(2), 125–131.
- Zahroh, N. I., Nasution, L. A., Tazqia, A. D., Faiha, H. A. I., & Nurhayati, D. (2025). Strategi pengumpulan data dalam penelitian kualitatif: Teknik, tantangan dan solusinya. *Tarbiyatul Ilmu: Jurnal Kajian Pendidikan*, 3(6), 107–118.